

Salam sejahtera,

Selamat datang dalam rangkaian acara REFLEKSI 30 TAHUN GERAKAN ANAK DI INDONESIA. Beragam kegiatan kami persembahkan untuk anda; mulai dari peluncuran website serta buku pemantauan pelaksanaan Konvensi Hak Anak, pameran arsip gerakan anak di Indonesia, *talkshow* di radio dan televisi, *video live streaming* di internet, seminar dan lokakarya, hingga pameran dan pentas karya anak. Tak ketinggalan, nama-nama besar dalam gerakan anak seperti Moelyono, Yayak Yatmaka, Susilo, Ibe Karyanto, Kak Wes, Mohammad Farid, Didid Adi Dananto dan masih banyak lagi kami hadirkan dalam pameran arsip karya mereka maupun dalam diskusi dan lokakarya sebagai narasumber maupun fasilitator.

Kami juga melibatkan sanggar, komunitas anak, dan berbagai organisasi, seperti Tlatah Bocah, Botagen, Papermoon, Yayasan Samin, Yayasan Humana, Indonesia Contemporary Art Network (iCAN), dan Jogja National Museum; serta para penulis dan pekerja seni, seperti Titarubi, Antariksa, Bambang Ertanto, Afrizal Malna, dan Fitri Setyaningsih untuk terlibat dalam rangkaian acara ini baik sebagai kurator pameran, direktur artistik pameran, penampil, penyelenggara acara, fasilitator maupun narasumber. Tak kalah pentingnya adalah anak-anak yang datang dari berbagai komunitas di sekitar Yogyakarta, yang dalam rangkaian acara ini akan terlibat sepenuhnya dalam lokakarya maupun pentas-pentas kesenian.

Sebelum menikmati semua rangkaian acara yang baru pertama kali digelar di Indonesia ini, Anda barangkali bertanya-tanya siapa gerakan gerakan anak di Indonesia, kenapa 30 tahun dan kenapa pula perlu direfleksikan? Booklet ini dan rangkaian acara kami persembahkan agar Anda bersama-sama kami menemukan sendiri makna perjalanan sejarah 30 tahun gerakan anak di Indonesia.

# Refleksi 30 Tahun Gerakan Anak di Indonesia

MENARIK mundur 30 tahun garis sejarah, kita menemukan tahun 1980. Beberapa peristiwa internasional dan nasional yang terjadi beberapa tahun sebelumnya menjadi tanda “berbeloknya sejarah” pergerakan untuk anak. Dalam konteks komunitas internasional, tahun 1979 ditetapkan sebagai Hari Anak Internasional oleh UNESCO. Bersamaan dengan itu badan PBB lainnya, UNICEF dan WHO, menggalang kegiatan-kegiatan untuk menarik perhatian dunia terhadap kondisi anak-anak di dunia yang berada dalam situasi sangat memprihatinkan. Di tahun itu juga, Negara Polandia secara resmi meminta agar deklarasi hak-hak anak yang lahir dari Save the Children di tahun 1959 dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat mengikat secara yuridis dan politis bagi negara-negara di dunia. Demikian pula, kelompok organisasi non-pemerintah internasional (salah satunya dimotori oleh Save the Children) segera membentuk Koalisi Organisasi Non Pemerintah Internasional untuk merealisasikan tuntutan tersebut. Banyak dari usaha tersebut mengerucut kepada diadopsinya Konvensi Hak Anak oleh PBB pada 1989.

Pemerintah Indonesia sendiri pada 1978 dan tahun-tahun sesudahnya telah mengeluarkan suatu keputusan untuk “membersihkan” kampus-kampus dari aktivitas gerakan sosial dan politik. Keputusan yang dikenal secara umum sebagai NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus) justru membuka jalan bagi sekelompok mahasiswa keluar dari kampus dan membangun gerakan

sosial di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah dengan kelompok sasaran anak-anak. Terinspirasi oleh tokoh-tokoh internasional progresif serta situasi nasional maupun lokal saat itu, anak-anak muda membangun gerakan pendidikan anti pembodohan dan pendidikan kritis. Mereka membangun lingkaran gerakan yang salah satunya adalah “gerakan anak merdeka”. Beberapa anak muda lainnya yang memandang betapa anak-anak miskin kota dan anak miskin desa telah dianggap bukan manusia dan menjadi “sampah pembangunan” bangkit dan bergerak berdasar “akal sehat” mendampingi anak-anak ini untuk berekspresi melalui media-media seni dan bahasa. Muncullah kelompok girli (pinggir kali: pinggir sungai) dan kelompok-kelompok lainnya. Pada titik ini pertarungan medan makna atas identitas anak antara negara, masyarakat sipil dan anak-anak menjadi makin jelas. Di satu sisi negara Indonesia dengan berbagai program, salah satunya adalah Keluarga Berencana memformat identitas anak sebagai bagian dari keluarga Indonesia yang musti mendukung pembangunan. Di lain sisi, masyarakat sipil dengan representasi Ornop Anak berusaha membangun kesadaran kritis anak melalui media-media seni sembari memfasilitasi anak-anak “korban



Gerakan anak dalam berbagai bentuknya sekarang ditantang untuk berefleksi secara jernih agar rumusan-rumusan pertanyaan dan jawaban-jawaban yang mungkin untuk hidup anak yang lebih baik tersedia.

pembangunan” untuk membentuk identitas yang positif bagi mereka sendiri. Anak-anak sendiri mulai bergerak melalui forum-forum anak di komunitas untuk menyuarakan keprihatinan dan opini mereka. Pada perkembangannya kemudian, interaksi dengan gerakan masyarakat sipil regional dan internasional juga membawa gerakan masyarakat sipil nasional menggunakan bahasa baru yakni “hak-hak anak” untuk bergerak. Hal ini juga dipicu oleh diratifikasinya Konvensi Hak Anak oleh Indonesia pada 1990 sehingga membawa Indonesia masuk dalam bagian gerakan global penegakan hak anak.

Belokan sejarah di Indonesia lainnya terjadi pada 1998. Perubahan secara drastis Indonesia menuju kepada negara yang makin demokratis sembari meninggalkan penyelenggaraan negara yang bersifat authoritarian sebelumnya juga mempengaruhi hidup dan gerakan anak di Indonesia. Sudah semestinya reorientasi penyelenggaraan negara yang demikian dibarengi juga oleh upaya-upaya

masyarakat sipil untuk menjawab tantangan jaman yang tengah berubah. Setelah 30 tahun bergerak dan di tengah bayang-bayang tata layanan publik yang diletakkan di tingkat kabupaten/kotamadya, kecepatan perubahan aktor pemerintah dan parlemen, perubahan tata negara dan tata kelola pemerintahan Indonesia yang makin membuka peluang kepada siapapun warganegara untuk berperan aktif di dalamnya, masyarakat sipil, dalam hal ini Organisasi Non-Pemerintah perlu melihat secara jernih apakah semuanya itu membawa kepada hidup anak yang lebih baik.

Gambaran secara sekilas di atas membawa kita kepada beberapa simpul. *Pertama*, gerakan anak di Indonesia awalnya adalah gerakan anak muda. Berinteraksi dengan faktor-faktor internasional dan kondisi nasional pada masa Orde Baru mereka bergerak bersama masyarakat sipil lainnya demi dan atas nama anak Indonesia. *Kedua*, pada kurun waktu 30 tahun terjadi belokan-belokan sejarah di tingkat nasional dan internasional yang membuat gerakan ini berubah untuk merespon belokan-belokan itu. *Ketiga*, di tahun ketigapuluh ini, gerakan anak dalam berbagai bentuknya sekarang ditantang untuk berefleksi secara jernih agar rumusan-rumusan pertanyaan dan jawaban-jawaban yang mungkin untuk hidup anak yang lebih baik tersedia. Namun demikian, sampai di sini juga tergambar bahwa barangkali kami terlalu menyederhanakan fenomena sosial yang begitu kompleks dan tumpang-tindih. Barangkali kami juga telah silap dalam membaca gerak sejarah dan melupakan peran aktor dan agen lain. Sampai di sini barangkali kami terlalu mengajak anda memberat-beratkan masalah sementara Anda sekedar ingin menikmati rangkaian acara ini dan bermain bersama Anak. Karena itu, kami mengundang Anda semua untuk memberi tafsir lain, membuka jendela lain memandang cakrawala sejarah (gerakan) anak di Indonesia. Kalaupun Anda sekedar ingin menikmati salah satu rangkain acara ini kami pun tetap bersyukur sebab itu artinya Anda masih menaruh perhatian bagi para pemilik masa depan Indonesia ini. Peran apapun yang Anda mainkan dalam rangkaian acara ini, Anda adalah bagian yang sangat penting bagi anak-anak Indonesia. Dan acara ini tak lain kami persembahkan untuk anak-anak di Indonesia agar hidup mereka menjadi lebih baik. Hanya dengan cara memastikan hidup anak yang lebih baik, maka kita mewariskan kepada generasi mendatang suatu masa depan Indonesia yang lebih baik.

**Setiawan Cahyo Nugroho**, *Save the Children*

**Fathuddin Muchtar**, *Yayasan Samin*

# Hasil-hasil Proyek Rintisan Pemantauan Pelaksanaan Konveksi Hak Anak di Indonesia

## **BUKU Panduan Penggunaan Instrumen Pemantauan Isu Khusus dalam Hak Anak**

Penerbitan buku ini dimaksudkan agar instrumen pemantauan yang digunakan di dalam proyek rintisan yang telah dilaksanakan oleh SAMIN dan Koalisi Nasional ORNOP Pemantau Hak Anak dapat digunakan secara lebih luas oleh para anggota Koalisi dan ORNOP-ORNOP anak lainnya di Indonesia. Buku ini ditulis oleh Mohammad Farid seorang aktivis yang memiliki pengalaman dalam penyusunan instrumen-instrumen pemantauan HAM khususnya hak anak.

## **Buku Analisis Situasi Hak Anak di Indonesia**

Buku ini berisi tentang Analisis Situasi Hak Anak di Indonesia untuk isu Anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban perdagangan, buruh anak, hak anak atas pendidikan dan kesehatan. Buku ini ditulis oleh lima orang yang mewakili lembaga masing-masing sesuai dengan fokus isu mereka. Tulisan mereka berdasarkan pemantauan yang dilakukan pada kurun waktu tahun 2009 dengan menggunakan instrumen pemantauan.

## **Buku Panduan Praktis WinEvSys**

Buku ini berisi tentang panduan praktis untuk mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dikembangkan oleh Huridocs Internasional dengan software yang bernama WinEvSys (Windows Event System). Dalam buku ini disertakan juga satu CD software yang bisa diinstal ke dalam komputer.

## **Website Dwi Bahasa [www.indochildrights.org](http://www.indochildrights.org)**

Website ini dimaksudkan sebagai sumber informasi tentang hak anak di Indonesia. Banyak materi-materi yang berkaitan dengan hak anak bisa diperoleh di dalam website ini.

# Anak Indonesia Bergerak

INILAH kenyataannya: kita tidak punya rujukan memadai tentang sejarah persoalan-persoalan anak di Indonesia.

Cara pandang tentang sejarah persoalan anak-anak di Indonesia yang biasa diterima hingga sekarang adalah cara pandang yang mencampurkan sejarah masalah anak-anak dengan sejarah pendidikan. Membicarakan masalah anak-anak berarti membicarakan “masalah anak-anak di sekolah”, dan masa anak-anak berarti “masa anak-anak di sekolah”. Cara pandang seperti ini setidaknya sudah berkembang lebih dari satu abad lamanya di Indonesia.<sup>1</sup> Pelajaran sekolah dikenalkan Belanda pada awal abad ke-20 kepada masyarakat Hindia sebagai alat untuk menjinakkan pikiran kaum pribumi. Dan melalui pengenalan pendidikan sekolah inilah, dimulai pula satu cara pandang dan juga pembentukan pengalaman masa kanak-kanak modern dalam masyarakat pribumi.

Versi resmi cara pandang negara terhadap anak-anak yang dikembangkan oleh Soeharto juga selalu merujuk filosofi “pendidikan yang benar” bagi anak-anak yang dikembangkan Ki Hadjar Dewantara

---

<sup>1</sup> Saya S. Shiraishi, 1997, *Young Heroes: The Indonesian Family in Politics*, Ithaca: Cornell University Press, h. 123.

pada awal 1920-an. Ki Hadjar Dewantara menyebut sekolah Taman Siswa-nya sebagai “keluarga”, di mana tugas seorang guru adalah seperti seorang *bapak* atau *ibu* yang membimbing dan mendidik anak-anaknya untuk menciptakan warga negara Indonesia yang segera merdeka. Sementara Soeharto—yang sepanjang kekuasaannya selalu mengidentikkan dirinya sebagai seorang bapak bagi seluruh warga —beranggapan bahwa anak-anak adalah anggota keluarga yang mesti disiapkan untuk menjadi “manusia pembangunan” atau “manusia Indonesia seutuhnya”. Dengan mengisolasi masalah anak-anak semata-mata sebagai masalah pendidikan, Soeharto sebenarnya tengah membangun suatu cara pandang yang memisahkan anak-anak dari kehidupan sosial politik.

### **Cara Pandang Pameran Ini**

Pameran ini mau menampilkan satu cara pandang alternatif tentang sejarah persoalan anak di Indonesia: *pertama*, kami menolak mengisolasi persoalan anak dan memilih meletakkannya ke dalam satu hubungan tak terpisahkan dengan persoalan-persoalan sosial dan politik di Indonesia. Kami percaya bahwa persoalan-persoalan anak di Indonesia mustahil dipahami tanpa, pada saat yang bersamaan, berusaha memahami konteks sosial-politiknya. Itulah kenapa kita mesti berhati-hati dan berusaha memahami kepentingan-kepentingan kekuasaan yang sepintas tampak bekerja di luar wacana persoalan anak. Konsepsi tentang keluarga misalnya, yang sangat dominan dalam perbincangan tentang anak sepanjang sejarah Indonesia modern, tak bisa dilepaskan dari politik gender dan kependudukan (Keluarga Berencana, PKK, dsb.) yang pada saat bersamaan juga terkait dengan ideologi-ideologi pembangunan yang tengah berlangsung. Konsepsi tentang kebersihan dan ketertiban, yang dominan dalam proyek-proyek pembersihan anak jalanan pada 1990-an, tak bisa dilepaskan politik pertahanan dan operasi-operasi tertib sosial seperti Operasi Esok Penuh Harapan, Gerakan Disiplin Nasional (GDN), dan juga ketakutan kepada hantu komunisme.

*Kedua*, kami memulai narasi dari periode akhir 1970-an. Dengan pilihan ini kami ingin menunjukkan ketakterpisahan antara tumbuhnya kesadaran baru akan persoalan-persoalan anak dengan tumbuhnya gerakan masyarakat sipil di Indonesia pada masa kekuasaan Orde Baru dan tumbuhnya konsepsi-konsepsi baru tentang persoalan anak dan gerakan sosial di dunia internasional.

Periode 1970-an merupakan periode pemaparan kekuasaan Orde Baru yang sangat penting. Indonesia mengalami lonjakan peningkatan pendapatan akibat ledakan harga minyak pada pertengahan '70-an, kestabilan keamanan dan politik membuat penanaman modal asing meningkat pesat, dan pada Pemilu 1977 Soeharto kembali berhasil memperpanjang kekuasaannya. Pada saat bersamaan ketidakpercayaan masyarakat sipil kepada Orde Baru juga mulai tumbuh. Dimulai

dengan Deklarasi Golput 1971, demonstrasi menolak Taman Mini Indonesia Indah pada 1972, Peristiwa Malari 1974 dan berpuncak pada demonstrasi besar mahasiswa pada 1978. Gerakan-gerakan protes yang terutama dimotori oleh mahasiswa itu kemudian mulai bergeser ke luar kampus setelah pemerintahan Soeharto menjawabnya dengan kebijakan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) yang melarang mahasiswa terlibat aktivitas politik. Kelahiran gerakan masyarakat sipil di Indonesia tidak akan dapat dipahami tanpa melihat hubungannya dengan berbagai peristiwa yang terjadi sepanjang 1970-an tersebut. Dan dalam pameran ini kami ingin menunjukkan bahwa gerakan anak di Indonesia juga tak bisa dipisahkan darinya, dan secara ideologis ia tumbuh sebagai suatu bentuk ketidakpercayaan dan perlawanan kepada kekuasaan Soeharto.

### **Arsip sebagai Wacana dan Bagaimana Mereka Ditata**

Pameran ini adalah pameran arsip. Yang kami dengan arsip di sini adalah koleksi catatan sajarah (dengan demikian: arsip seperti yang dipakai dalam ilmu sejarah). Sejarah melekat dalam banyak objek material, misalnya: lagu, gambar, foto, film, dokumen surat-menyurat, buku, majalah, koran, poster, pakaian, atau juga benda-benda keseharian lainnya. Objek-objek ini adalah arsip. Kami memperlakukan arsip sebagai wacana. Ia adalah sekumpulan cerita tentang bagaimana persoalan-persoalan anak dan gerakan anak dibicarakan dan dibayangkan. Pencerita utamanya ada tiga, yaitu anak-anak, aktivis dan organisasi-organisasi yang menaruh perhatian pada persoalan anak, serta negara dan aparatusnya. Di dalam pameran ini sekumpulan wacana itu dikelompokkan ke dalam 3 wacana, yang kami anggap sebagai wacana-wacana pokok gerakan anak di Indonesia 30 tahun belakangan ini, yaitu *pendidikan*, *jati diri*, dan *hak-hak anak*. Tiga wacana itu bisa dibaca sebagai pembabakan sejarah gerakan anak di Indonesia.

Pada babak pertama (1980-an) wacana yang dominan adalah *pendidikan kritis-alternatif* versi masyarakat sipil berhadapan dengan pendidikan versi negara. Praktik-praktik gerakan pemberdayaan anak yang dikembangkan oleh para aktivis di babak ini bisa dikatakan merupakan respon pada ideologi pendisiplinan lewat sekolah yang dijalankan Orde Baru. Model-model pendidikan pembebasan, seni sebagai alat revolusi sosial dan juga kritik pada rezim sekolah formal merupakan gagasan-gagasan yang dominan pada babak ini. Kita bisa melihat berbagai eksperimen kurikulum dan metode pengajaran yang dikembangkan melalui sanggar-sanggar dan penggunaan secara luas kesenian sebagai alat untuk menumbuhkan daya kritis dan kemandirian anak-anak: musik lingkungan, teater rakyat, seni rupa dialogis-transformatif, dsb.

Pada babak kedua (1990-an) *jati diri* merupakan wacana yang dominan. Dengan wacana jati diri, kami maksudkan sekumpulan cerita anak-anak yang secara luas mulai membicarakan kenyataan-kenyataan dirinya. Dalam pameran ini, kami memberikan porsi yang lebih besar pada babak jati diri ini dibandingkan dengan babak lainnya, karena di sinilah kita bisa melihat benturan-benturan yang sangat jelas antara konstruksi kehidupan dan dunia anak-anak yang diinginkan penguasa dan orang tua dengan pengalaman nyata yang dialami oleh anak-anak. Konsepsi ideal penguasa dan orang tua tentang masa kanak-kanak yang indah, tentang rumah dan keluarga idaman, kini dijajarkan dengan kenyataan-kenyataan terburuk tentang kehidupan anak-anak di luar rumah dan keluarga.

Pembentukan keluarga baru dan konsolidasi di luar rumah yang dilakukan oleh anak-anak sendiri juga terjadi di sini. Anak-anak bertemu dengan sesamanya dari berbagai kota dan daerah, dan mulai mencipta bahasa dan solidaritas bersama. Di dalam proses penciptaan bahasa dan solidaritas bersama ini, jalanan dan kereta api memainkan peran paling penting. Jalanan memberi pengalaman, suka maupun duka. Anak-anak bekerja-paksa, dilacurkan dan diperkosa, dijual, dipukuli polisi, dikompas preman, terluka, dan mati. Anak-anak menemukan kesenangan di pelacuran, di tempat judi, atau di arena permainan video. Pengalaman-pengalaman ini mencipta bahasa, dan kereta api menghubungkan, menyebarkan, memperkuat, dan kemudian mencipta solidaritas bersama.

Pada babak ketiga (2000-an) wacana *hak-hak anak* menjadi dominan. Instrumen-instrumen legal tentang hak anak semakin mapan, dan para aktivis anak mengembangkan pendekatan-pendekatan yang makin sistematis dan terukur terhadap pemenuhan hak-hak dan partisipasi anak.

Selain untuk menyusun kesinambungan narasi dalam garis waktu, pembabakan umumnya memang bisa dilihat sebagai suatu upaya untuk menyusun kesinambungan dan tahap-tahap kemajuan dalam sejarah. Tetapi pada pameran ini kami sekaligus juga memperlakukan pembabakan untuk menunjukkan ketaksinambungan dan kemunduran-kemunduran. Satu contoh: dilihat dari segi pembentukan instrumen-instrumen legal dan metode-metode sistematis-terukur pemenuhan hak anak, bisa dilihat bahwa babak ketiga sebagai suatu tahap puncak kemajuan. Namun pada babak yang sama juga bisa dilihat hilangnya pengalaman dan bahasa anak-anak, juga hilangnya semangat perlawanan dan berbagai eksperimen pendidikan kritis. Tentu saja perubahan-perubahan bentuk dan watak gerakan anak ini—baik yang sinambung maupun tidak—juga dipengaruhi perubahan bentuk dan watak kekuasaan yang dihadapinya. Karena itu pameran ini sebenarnya juga merupakan sebuah pertanyaan tentang arah dan ideologi gerakan anak di Indonesia.

**Antariksa, Kurator**

# Wacana Anak di Pentas Masyarakat Indonesia

PAMERAN ini mengusung tema Refleksi 30 tahun Gerakan Anak di Indonesia. Diawali dari gerakan mahasiswa 1978 dan berakhir dengan pembuatan Laporan Tinjauan Pelaksanaan Hak Anak di Indonesia 1997-2009. Selama rentang waktu tersebut, akan diperiksa kembali tonggak-tonggak keputusan politik, (re)aksi masyarakat sipil dan suara anak-anak. Konsep anak menjadi arena pertarungan utama. Negara atau elit nasional, aktivis sosial dan anak bertarung untuk memproduksi wacana anak dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

## **Periode 80: Zaman Normalisasi**

Pada tahun 1978, mahasiswa di berbagai kampus, terutama UI, UGM dan ITB, melakukan pembangkangan. Selama berbulan-bulan, mahasiswa menolak Soeharto untuk dicalonkan menjadi Presiden. Aksi pembangkangan ini dianggap sebagai tindakan abnormal. Oleh karena itu harus dikembalikan masuk ke dalam kampus dengan penjagaan ketat. Militer melakukan pengepungan kemudian merangsek masuk kampus dan melakukan penembakan dan pengrusakan, terutama di UGM dan ITB. Peristiwa ini menandai penaklukan kampus. Secara fisik diduduki oleh militer dan secara ideologis dengan seluruh paket NKK, Normalisasi Kehidupan Kampus. Kampus tidak boleh berhubungan dengan orang luar kecuali melalui rektor. Akhirnya, kampus menjadi wilayah yang tertutup dan hampir-hampir berubah menjadi daerah pemenjaraan mahasiswa.

Normalisasi juga dilakukan pada tingkat TK sampai pendidikan sekolah menengah, melalui SK No 052/C/Kep-D/1982 tentang pakaian seragam sekolah. Di sana disebutkan bahwa sekolah sebagai tempat belajar mengajar untuk *membangun manusia Indonesia seutuhnya* dan meningkatkan *ketahanan sekolah* maka dibutuhkan *seragam sekolah*. Melalui SK ini tersirat bagaimana ideologi tentang Manusia Indonesia Seutuhnya dibangun melalui seragam sekolah.

Dalam SK tersebut juga dicantumkan langkah-langkah memperlakukan seragam sekolah secara hormat sebagai berikut: menjaga selalu bersih, rapi, tidak lusuh, tidak dibiarkan robek atau lepas jahitannya dan sesuai fungsinya untuk upacara berbeda dengan untuk harian. Langkah-langkah penghormatan semacam ini sesungguhnya adalah satu metode bagaimana memperlakukan tubuh dan dengan demikian menjadi tubuh yang lunak, tubuh yang bisa diperintah.



Bila Negara dan elit nasional menggunakan seragam sebagai teknik yang penting untuk melakukan kontrol maka aktivis anak-anak menandinginya dengan mengajarkan menggali budaya lokal yang majemuk.

NKK/BKK, di luar dugaan, justru melahirkan ratusan kelompok studi dan kehadiran organisasi non-pemerintah. Mereka menghidupkan diskursus perlawanan-perlawanan politik dengan mengambil idealisasi kaum pergerakan tahun 1920-an. Secara pikiran, mereka menggunakan diskursus marxisme (siapa yang menentukan kebenaran, institusi yang paling menonjol dan apa hasilnya) sebagai landasan berpikir untuk melawan dan dari segi praksis mereka mengambil jalan pengorganisasian.

Melihat pendidikan sebagai dunia tertakluk, sebagian mantan aktivis mahasiswa 78 yang berhimpun di Olah Kreasi Seni Anak Merdeka dan Olah Kreatif Anak menjadi (Sang) pemula untuk mempromosikan pendidikan alternatif, yang dikemudian hari dikenal sebagai pendidikan hadap masalah. Dengan lantang mereka melakukan kritik terhadap sistem pendidikan dengan mengajukan pertanyaan: Apa beda pendidikan untuk anjing dan pendidikan untuk anak? Jawabnya adalah: Anjing dididik untuk menghibur atau menyenangkan Tuannya karena bisa menuruti semua perintah diberikan. Sementara Anak-anak dididik untuk bisa memahami persoalan yang dihadapi sekaligus

mencari jalan keluarnya serta dilatih kesadarannya untuk melakukan pengaturan diri sendiri oleh mereka sendiri.

Pertanyaan dan jawaban yang diajukan mengemakan kembali pikiran Ivan Illich tentang bebas dari sekolah dan pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan kaum tertindas. Pertama-tama, secara samar terdengar gema gagasan Illich bahwa meyakini sekolah formal sebagai satu-satunya sumber pengetahuan adalah keliru besar. Sekolah formal tidak lagi berbeda dengan sekolah anjing: dibuat untuk kepentingan para Tuan. Demitologisasi sekolah formal ini kemudian diikuti dengan gagasan Freire mengenai pendidikan sebagai proses penyadaran dan perjuangan untuk mencapai kebebasan.



Bebeda dengan anak-anak sekolah yang mengenakan seragam sehingga mudah diidentifikasi, kehadiran anak-anak yang hidup di jalan dianggap sebagai menyimpang. Tidaklah mengherankan kalau kehadirannya segera dicap mengganggu ketertiban umum dan oleh karenanya harus didisiplinkan.

Untuk menandingi materi-materi yang di(h)ajarkan dalam sekolah formal, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pendidikan alternatif mengembangkan modul-modul pembelajaran melalui gambar bercerita, gambar kelompok, musik lingkungan, drama sampai modul diskusi kelompok.

Dalam periode 1980-an ini, pendidikan menjadi medan yang penting untuk memaknai anak-anak. Bila Negara dan elit nasional menggunakan seragam sebagai teknik yang penting untuk melakukan kontrol maka aktivis anak-anak menandinginya dengan mengajarkan menggali budaya lokal yang majemuk.

### **Periode 90: Zaman Pendisiplinan**

Awal '90-an, perhatian mengenai anak-anak tidak lagi didominasi oleh medan pendidikan tetapi mulai digantikan oleh gagasan mengenai identitas anak Indonesia. Pada saat itu kehadiran anak-anak jalanan dirasakan mencoreng keberhasilan pembangunan yang didengung-dengungkan selama ini. Pada 1990, YKAI dan Childhope melakukan penelitian tentang anak jalanan di wilayah Senen,

Jakarta. Salah satu temuan dari penelitian itu adalah anak jalanan bukanlah satu kategori yang homogen. Berdasarkan relasi dengan keluarga, setidaknya ada dua kategori: anak yang bekerja di jalan dan anak yang hidup di jalan. Yang disebut pertama masih berhubungan dengan keluarga sedangkan yang terakhir sudah putus hubungan dengan keluarga.

Anak-anak yang hidup di jalan, tumbuh dan besar di luar keluarga. Di Jakarta mereka menyebut dirinya gembel sedangkan di Yogyakarta mereka menyebut dirinya Tekyan. Anak-anak ini tumbuh dengan gaya hidup yang berbeda dengan anak tumbuh di dalam keluarga. Mereka biasa tinggal di tempat-tempat umum, seperti stasiun kereta api, kolong jembatan dan sebagainya. Sebelum memutuskan untuk menetap di satu kota, biasa mereka menetap untuk sementara waktu di beberapa kota sampai menemukan kota yang dianggap cocok.

Rel kereta api menjadi bagian penting bagi anak-anak yang hidup di jalan. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan di gerbong-gerbong yang membawa pergi dari satu kota ke kota lain. Tidaklah mengherankan bila pada waktu itu, sebagian besar mengenal satu sama lain. Gembel Jatinegara kenal dengan anak Jogja, Tekyan Jogja kenal dengan anak-anak Bandung dan seterusnya. Mereka memiliki jaringan yang mereka bangun sendiri. Melalui jaringan itu mereka menciptakan bahasa dan subkultur sebagai bagian untuk memperkuat solidaritas.

Bebeda dengan anak-anak sekolah yang mengenakan seragam sehingga mudah diidentifikasi, kehadiran anak-anak yang hidup di jalan dianggap sebagai menyimpang. Tidaklah mengherankan kalau kehadirannya segera dicap mengganggu ketertiban umum dan oleh karenanya harus didisiplinkan.

Untuk menangani anak jalanan, pemerintah melakukan operasi tertib sosial. Penertiban ini digunakan sebagai alat untuk mendisiplinkan para tekyan dan gembel. Dimulai dari Perda No 11/1988 tentang Ketertiban Umum, Operasi Penuh Harapan tahun 1990 dan mencapai titik puncaknya dengan dicanangkannya Gerakan Disiplin Nasional. Dalam rentang waktu 9 tahun, gerakan disiplin bekerja sedemikian rupa dan memuncak pada militerisasi masyarakat. Satuan pengamanan tumbuh dengan pesat dan muncul hampir di semua tempat, rumah, pabrik, pusat pertokoan dan sebagainya. Apabila tidak mampu menyewa satpam, di ujung-ujung jalan masuk kampung di tulis PEMULUNG DILARANG MASUK.

Sementara itu organisasi non-pemerintah sebagai lembaga alternatif dari pemerintah tidak memandang anak jalanan sebagai anak-anak yang menyimpang dan karena itu harus ditertibkan tetapi sebaliknya yaitu menempatkannya sebagai anak-anak seharusnya mendapat perlindungan.

Pada saat yang sama, gerakan untuk melindungi anak-anak yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah mendapat dukungan dari lembaga-lembaga internasional pun mulai terbuka.

Tingginya mobilitas anak-anak yang hidup di jalan, membuat penanganan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi non-pemerintah pun berubah. Jaringan antar anak jalanan sudah terbentuk sebelum program lembaganya dijalankan. Akibatnya lembaga-lembaga yang menangani anak jalanan “dipaksa” mengikuti gerak anak jalanan. Mereka dipaksa berjejaring dengan lembaga yang ada di kota lain. Kerjasama itu akhirnya terwujud dalam wadah Konsorsium Anak Jalanan. Pola kegiatan pun berubah, kegiatan-kegiatan bersama menjadi agenda utama: mulai dari pameran, pendidikan kesadaran melalui kemah bersama dan mulai masuk dalam kegiatan swa bela yang diperkenankan seperti mengadu ke Komnas HAM, DPRD serta melakukan demonstrasi.

Periode ini juga ditandai dengan ledakan media yang ditulis anak-anak. Pengalaman-pengalaman anak-anak yang dituangkan dalam wujud gambar, puisi, cerita, berita dan lirik lagu langsung bertabrakan dengan proses pendisiplinan yang dilakukan oleh negara. Di tangan anak-anak jalanan, GDN berubah menjadi GEBUG DAN NYIKSA. Ketika Indonesia mendapatkan penghargaan internasional karena program keluarga berencana, pengalaman anak-anak jalanan menunjukkan sebaliknya yakni, keluarga yang rapuh. Bagi anak-anak, hasil pembangunan adalah penggusuran, penyiksaan, putus sekolah dan semacamnya. Perlawanan menghadapi disiplin yang diterapkan oleh negara mengandung resiko pelarangan atau pembubaran kegiatan, atau ditangkap dan diinterogasi meski tidak sampai masuk penjara. Bukan hanya sekali atau dua kali, pementasan atau pameran tidak bisa dilaksanakan karena dilarang oleh pihak yang berwenang. Majalah JEJAL baru sehari terbit pun dilayangi surat larangan untuk tidak terbit karena tidak memiliki izin.

Ketika tekanan yang dihadapi sedang mencapai puncaknya, Institut Sosial Jakarta memelopori kegiatan pemberian Award untuk Anak Pinggiran. Penghargaan ini tentu saja bertabrakan langsung dengan gagasan Negara mengenai anak-anak Indonesia. Berlawanan dengan idealisasi pemerintah Orde baru tentang anak Indonesia yang patuh dan penuh tanggung jawab, mereka yang mendapat penghargaan adalah anak-anak yang mampu merenungkan akar masalah menyebabkan dia terpinggir dan tergerak untuk terlibat dalam perjuangan membebaskan dirinya.

### **Periode 2000: Pendekatan Berbasis Hak**

Konvensi Hak Anak telah membawa perubahan yang radikal karena memosisikan anak sebagai manusia dan sekaligus subyek hukum. Ia memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya. Sebelumnya anak tidak dianggap sebagai subjek, melainkan hanya sebagai objek milik orangtua semata. Oleh

karena itu masyarakat masyarakat mentolerir dan menganggap biasa jika orangtua menghukum secara fisik atau membiarkan anaknya bekerja.

Reformasi 1998 membawa dampak pada strategi perubahan gerakan untuk anak-anak di Indonesia. Gagasan untuk mendorong perubahan sosial yang dipilih adalah memperkenalkan nilai dan aturan baru. Pengenalan hak anak sebagai nilai baru harus segera dilanjutkan dengan pemberlakuan aturan yang mengikat dan membawa sanksi bagi setiap pelanggarnya. Cita-citanya adalah hak anak tidak lagi sekedar pernyataan politik di atas kertas tetapi menjelma menjadi suatu standar yang bisa diadili.

Jalan berpikirnya adalah melalui aturan-aturan berkekuatan hukum yang telah ditetapkan, maka penegakan hukum bisa dijalankan. Andai dilakukan secara konsisten, maka akan memiliki daya paksa bagi untuk warga masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang sudah diatur. Dengan demikian satu dua generasi berikutnya, anak-anak mulai terpenuhi haknya. Jadi penegakan hukum pada gilirannya akan memperkuat nilai yang diidam-idamkan. Strategi ini dipilih karena Republik Indonesia sudah ikut menyetujui Konvensi Hak Anak (KHA), karena itu Indonesia terikat pada kewajiban yuridis untuk mengimplementasikan KHA di dalam wilayah hukumnya. Strategi ini berhasil mendorong DPR RI untuk mengesahkan beberapa UU yang terkait dengan perlindungan anak-anak.

Dalam gerak perubahan itu, organisasi non pemerintah melihat bahwa aksi pemantauan pelaksanaan KHA menjadi kegiatan strategis. Ada 3 hal yang dipantau yaitu kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk melindungi dan kewajiban untuk memenuhi. Melalui kegiatan ini dilakukan pemantauan: apakah negara, perangkat dan aparatnya melakukan pelanggaran atau tidak? Apakah negara memberikan perlindungan agar anak tidak dilanggar haknya oleh orang atau individu lain (termasuk orangtua sendiri) dan memberikan sanksi bagi setiap pelanggaran? Apakah negara sudah memberikan apa-apa yang diakui sebagai hak dalam ketentuan konvensi yang ada?

Untuk itu kemudian dibangun instrumen-instrumen untuk memantau pelaksanaan pemenuhan hak anak dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak. Melalui pemantauan ini bisa dikenali secara lebih terukur sejauh mana negara, perangkat dan aparatusnya sudah memenuhi hak anak di Indonesia. Anak-anak pun dilibatkan dalam pemantauan melalui forum-forum konsultasi. Meski demikian harus diakui bahwa praktik semacam ini masih sangat baru dilakukan di Indonesia. Pertanyaannya: apakah kegiatan pemantauan ini bisa menjadi motor gerakan nasional untuk pemenuhan hak anak?

**Bambang Ertanto**, *Kurator*

Steering Committee: Setiawan Cahyo Nugroho & Odi Sholahudin

Koordinator : Fathuddin Muchtar

Kurator: Antariksa & Bambang Ertanto

Direktur Artistik: Titarubi

Keuangan: Indrawati

Asisten Kurator: Maya Larasati

Asisten Direktur Artistik: Anang Saptoto

Staf Artistik: Ando Sukma Wardhana, Bakkar Wibowo, M. Sigit Nurcahyo, Nataleksa, Eko Hantoro, Adit, Ignasius, Bambang Senthot, Rohmadi, Aditya, Budi Kancil, Catur, Diki Cahyo Gumelar, Mas Noer, Sul, Peyok, Agil, Eros, Anggi

Staf Keuangan: Siti Rokhayah, Fitri Kristyoarti

Hubungan Media: Dominicus Septian Henri Saputro

Workshop & Acara: Andri Kurniawan, Arief Winarko

Transportasi: Jumadi Kristmanto